BAB IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, bahwa Rencana Kerja (Renja) Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat ini merupakan dokumen rencana operasional (tahunan) pembangunan sub sektor perkebunan di Provinsi Jawa Barat, yang akan menjadi acuan pelaksanaan bagi segenap pemangku kepentingan pembangunan sub sektor perkebunan di Jawa Barat selama Tahun 2016.

Renja Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 merupakan fase ke-tiga dari penjabaran Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2013–2018 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018. Dengan demikian Renja ini secara substansial bersifat sinergis dengan ketentuan-ketentuan pokok yang termuat dalam kedua payung hukum tersebut.

Renja Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat ini memuat uraian tentang upaya pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, serta target indikator kinerja program/kegiatan prioritas pembangunan perkebunan Jawa Barat tahun 2016. Renja ini juga mengacu pada isu-isu strategis yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018, serta mengacu pula kepada isu-isu aktual yang berkembang di masyarakat perkebunan, khususnya yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat.

Dari aspek penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi setiap unit kerja pada Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat, maka Renja ini sangat terkait dengan implementasi seluruh tupoksi unit kerja, baik aspek *on–farm* maupun *off–farm* untuk lima tahun mendatang (2013-2018), termasuk untuk peningkatan dukungan fasilitasi terhadap tuntutan kebutuhan stimulasi pada tingkat kelompok tani atau pelaku usaha perkebunan.

Bab IV - 1 -

4.2. Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Dalam rangka menjamin terlaksananya pencapaian arah, tujuan, sasaran dan target prioritas yang telah dirumuskan dalam Renja Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 ini, serta untuk terwujudnya sinergitas pencapaian target kinerja program/kegiatan pembangunan sub sektor perkebunan Jawa Barat dengan semua pihak terkait, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

- 1. Renja Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 ini merupakan dokumen rencana jangka pendek (tahunan) untuk pembangunan sub sektor perkebunan di Jawa Barat. Oleh karena itu dokumen ini harus menjadi acuan bagi semua pemangku kepentingan terkait, termasuk setiap unit kerja pada Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat, yang akan terlibat atau ikut serta dalam proses pelaksanaan program/kegiatan pembangunan sub sektor perkebunan di Jawa Barat selama Tahun Anggaran 2016.
- Renja Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 ini dalam pelaksanaannya diarahkan secara sinergis untuk dapat dibiayai oleh berbagai sumber anggaran, baik dana APBN pada Kementerian Pertanian, dana APBD Provinsi Jawa Barat, dana pendampingan APBD Kabupaten/Kota, serta sumber dana dari peran serta dunia usaha (CSR/PKBL).
- 3. Dalam rangka sinkronisasi, sinergitas, harmonisasi dan integrasi pelaksanaan program/kegiatan pembangunan yang telah dirumuskan, maka tahapan selanjutnya Renja Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 ini harus dijabarkan dalam proses penyusunan perencanaan teknis, yaitu: Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA-APBD), Rencana Kegiatan dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL), atau perencanaan anggaran dari sumber-sumber dana lainnya yang sah.

Bab IV - 2 -

4.3. Rekomendasi

Renja Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 ini diberlakukan sejak tanggal ditetapkan sampai dengan akhir tahun 2016, dan dalam pelaksanaannya dapat diperbaiki sesuai dengan ketentuan yang berlaku, jika terdapat hal-hal pokok yang perlu disesuaikan.

Untuk menjamin pencapaian target kinerja secara optimal, maka diperlukan adanya langkah-langkah awal persiapan, yang dapat dimulai sejak tanggal ditetapkan hingga proses pelaksanaannya, dengan memperhatikan dan menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, sinkronisasi, sinergitas, harmonisasi, efektivitas serta efesiensi dari semua pihak pemangku kepentingan terkait.

Ditetapkan di : Bandung Tanggal : Juni 2015

KEPALA DINAS PERKEBUNAN PROVINSI JAWA BARAT

H. ARIEF SANTOSA, SE., M.Sc. Pembina Utama Muda NIP. 19580516 198603 1 003

Bab IV - 3 -